

---

## Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019

Sinta Claudia Fitaloka\*, Muhammad Rusmin Nuryadin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

[\\*sintaclaudia.fitaloka@gmail.com](mailto:*sintaclaudia.fitaloka@gmail.com)

### Abstract

*The research aims to verify and analyze the effect of GRDP, PMA, PMDN, capital expenditures, and minimum wages on labor absorption. The data are descriptive with secondary data. The analysis is panel data regression analysis, a combination of data for 2015 – 2019 and cross-section data for 13 districts/cities in South Kalimantan Province, which were processed using the REVIEWS 11 application.*

*The results show that (1) GRDP, PMA, PMDN, capital expenditure, and minimum wages that affect the absorption of labor simultaneously; (2) The minimum wage have a significant positive, GRDP have an insignificant positive, PMA, PMDN, and capital expenditures have an insignificant negative effect on the absorption of labor district/cities in South Kalimantan Province in 2015 – 2019.*

**Keywords:** GRDP; PMA & PMDN; Capital expenditure; Minimum wages; Labor absorption.

### Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian untuk menguji sekaligus menganalisis pengaruh PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum pada penyerapan tenaga kerja. Dengan data sekunder data bersifat deskriptif kuantitatif. Teknik analisis dipakai adalah regresi data panel, merupakan penggabungan data tahun 2015 – 2019 dan *cross section data* sebanyak 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang diolah menggunakan aplikasi EVIEWS 11.

Hasil penelitian memperlihatkan (1) PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, dan upah minimum mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja dengan simultan; (2) Upah minimum mempengaruhi positif signifikan, PDRB berpengaruh positif tidak signifikan, PMA, PMDN, serta belanja modal mempengaruhi negatif tidak signifikan pada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2019.

**Kata Kunci:** PDRB; PMA & PMDN; Belanja modal; Upah minimum; Penyerapan tenaga kerja.

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bagian dari kelompok negara berkembang yang tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, permasalahan yang dialami merupakan pesatnya total jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Jumlah kenaikan ini memperlihatkan bahwa penawaran akan tenaga kerja pada pasar terus meningkat, sebaliknya permintaan tenaga kerja tidak sanggup menyerap angkatan kerja yang jumlahnya sangat banyak.

Di Kalimantan Selatan jumlah angkatan kerja mencapai 2,25 juta jiwa, terdiri dari 2,17 juta jiwa bekerja, dan 78,33 juta jiwa masih menganggur. Pada februari 2019, TPAK sebesar 73,98% dan TPT sebesar 3,50%. Sebanyak 55,07% penduduk bekerja pada sektor informal, sebesar 20,44% usaha mandiri, usaha dengan pekerja buruh tidak tetap sebanyak 14,09%, bekerja bebas sebesar 3,99%, dan pekerja yang tidak diupah 16,55%. Sedangkan pekerja disektor formal tercatat sebesar 44,93%, karyawan atau buruh 40,98%, dan usaha dengan pekerja tetap sebesar 3,95% (BPS, 2020).

**Tabel 1**  
**Komposisi Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2015 – 2019 (Jiwa)**

Tahun	Pengangguran	Bekerja	Angkatan Kerja
2015	97.748	1.889.502	1.987.250
2016	113.296	1.965.088	2.078.384
2017	98.956	1.975.161	2.074.117
2018	95.278	2.021.666	2.116.944
2019	91.730	2.036.736	2.128.466

*Sumber : BPS Provinsi Kalsel*

Tabel 1 komposisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan terlihat jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 angkatan kerja sebesar 2.128.466 jiwa, pada jumlah bekerja mencapai 2.036.736 jiwa. Kemudian jumlah pengangguran terbesar pada tahun 2016 sebesar 113.296 jiwa dan jumlah pengangguran terendah pada tahun 2019 sebesar 91.730 jiwa.

Sebagai upaya pemerintah dalam mendorong kenaikan jumlah kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran dibutuhkan kebijakan. Faktor yang pemerintah dapat lakukan sebagai upaya menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan yaitu melalui PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, dan kebijakan upah minimum Kabupaten/Kota.

Masalah yang peneliti ingin bahas adalah : (1) apakah PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, dan upah minimum Kabupaten/Kota mempengaruhi signifikan pada penyerapan tenaga kerja (2) apakah PDRB, PMA, PMDN, dan belanja modal mempengaruhi positif pada penyerapan tenaga kerja, upah minimum mempengaruhi negatif penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuannya yaitu : (1) Menguji dan menganalisis secara simultan pengaruh PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, dan upah minimum Kabupaten/Kota pada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2) Menguji dan menganalisis secara parsial mempengaruhi PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, dan upah minimum Kabupaten/Kota pada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Tenaga Kerja**

Merupakan penduduk berusia lima belas tahun lebih sanggup melaksanakan kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa demi memenuhi keperluan hidupnya.

### **Penyerapan Tenaga Kerja**

Merupakan jumlah posisi pekerjaan telah terisi terlihat dengan jumlah penduduk telah bekerja pada sektor ekonomi (Kuncoro, 2002).

### **Teori Permintaan Tenaga Kerja**

Dapat dikatakan diantara tingkat upah dan total pekerja berhubungan, dipekerjakan kemudian telah ditentukan oleh pemilik (Afrida, 2003).

### **Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Jika PDRB mengalami peningkatan, maka total nilai tambah output penjualan barang atau jasa seluruh unit dalam ekonomi di setiap Kabupaten/Kota juga akan meningkat. Dimana dalam peningkatan nilai tambah output tersebut membutuhkan tenaga kerja.

### **Hubungan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Melalui keberadaan PMA dapat meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya masing-masing daerah. Kemudian masuknya PMA dapat mengurangi beban keuangan pemerintah di bidang infrastruktur.

### **Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

PMDN merupakan investasi dalam negeri dan salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembentukannya, PMDN telah membawa kemajuan ke arah teknologi yang mendalam untuk menghemat produksi dalam skala besar. Sehingga, PMDN dapat menghasilkan peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, memecahkan masalah inflasi, dan masalah neraca pembayaran.

#### **Hubungan Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Merupakan anggaran pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Dengan harapan akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi, jika kegiatan ekonomi meningkat maka akan dapat menaikkan pertumbuhan perkonomian, serta kemudian memperbaiki kesejahteraan, dimana tenaga kerja dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

#### **Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Naik atau turunnya jumlah upah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, jika permintaan akan barang atau jasa naik maka akan diikuti dengan semakin banyaknya perusahaan yang akan memasuki pasar. Kemudian perusahaan akan meningkatkan produksi salah satunya dengan meningkatkan jumlah tenaganya.

Naiknya upah juga mampu menyebabkan dampak negatif, dimana pengusaha menganggap upah sebagai suatu beban perusahaan karena pendapatan harus dikurangi untuk membayar upah pekerja. Semakin besar dan banyak upah yang dikeluarkan, akan menyebabkan semakin sedikitnya pendapatan perusahaan tersebut. Jika tingkat upah sedang naik perusahaan akan melakukan dua kemungkinan yaitu, pertama perusahaan akan mempertahankan jumlah pekerja yang telah tersedia, kedua perusahaan kemungkinan tidak akan menerima pekerja.

#### **Penelitian Terdahulu**

Bubi (2018) berjudul “Government Expenditure, Private Investment and GRDP Analysis of Kalimantan Human Absorption”, menunjukkan bahwa investasi swasta dan PDRB terdapat pengaruh.

I Gusti (2015) berjudul “The Effect of Inflation, GRDP, and Minimum Wage on Labor Absorption in Bali Province”, menunjukkan PDRB serta upah minimum mempengaruhi kepada penyerapan tenaga kerja.

Ikka (2013) berjudul “The Effect of Inflation and Wages Levels on Employment Opportunities in East Java”, menunjukkan tingkat upah berdampak pada kesempatan kerja di Jawa Timur.

#### **METODE**

Ruang lingkup penelitian meliputi PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, upah minimum, serta penyerapan tenaga kerja pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 2015 – 2019. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif karena peneliti bertindak sebagai pengamat dan bertujuan mendeskripsikan kemudian memecahkan permasalahan dengan sistematis, akurat, faktual dan kuantitatif. Menggunakan teknik analisis regresi data panel yang bersumber dari buku, jurnal, dan data resmi bersumber dari dinas pemerintah.

#### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

##### ***Penyerapan Tenaga Kerja***

Yaitu total pekerja terserap di berbagai sektor. Diuji menggunakan jumlah pekerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 yang terserap dengan satuan jiwa/orang per tahun.

##### ***Produk Domestik Regional Bruto***

PDRB yaitu semua penjualan barang atau jasa atas kegiatan ekonomi pada periode yang telah ditentukan. Digunakan PDRB berdasarkan harga konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.

##### ***Penanaman Modal Asing***

Merupakan modal bersumber dari pihak swasta atau luar negeri. Digunakan realisasi PMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.

#### ***Penanaman Modal Dalam Negeri***

Merupakan suatu modal yang dilakukan didalam negeri atau domestik. Digunakan data realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.

#### ***Belanja Modal***

Belanja modal merupakan anggaran keluaran pemerintah dialokasikan demi memperoleh aset tetap membangun sarana dan prasarana kepentingan publik. Digunakan data realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.

#### ***Upah Minimum***

Upah minimum merupakan upah terendah sebagai batasan pengusaha dalam menetapkan upah pekerja. Digunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tidak menerapkan UMK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan (Rp) per tahun.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Melalui studi pustaka merupakan cara mengumpulkan data berbagai sumber buku, jurnal, dan data publikasi dari Badan Pusat Statistik, serta datang langsung ke instansi pemerintah di Kalimantan Selatan terkait.

#### **Teknik Analisis Data**

##### ***Analisis Regresi Data Panel***

Sebagaimana permodelan dari Gujarati & Porter (2012) yang diimplikasikan ke dalam model penelitian ni tentang penyerapan tenaga kerja, dengan model :

$$LnY_{it} = B_0 + B_1LnX_{1it} + B_2LnX_{2it} + B_3LnX_{3it} + B_4LnX_{4it} + B_5LnX_{5it} + u_{it}$$

Ket :

$LnY_{it}$	= Penyerapan Tenaga Kerja
$B_0$	= Konstanta
$B_1, B_2, B_3, B_4, B_5$	= Koefisien Regresi
$LnX_1$	= PDRB (Rp)
$LnX_2$	= PMA (Rp)
$LnX_3$	= PMDN (Rp)
$LnX_4$	= Belanja Modal (Rp)
$LnX_5$	= Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp)
$Ln$	= Logaritma Natural
$u$	= Error
$i$	= 1, 2, 3, 4, 5, ...,13 ( <i>cross-section data</i> Kabupaten/Kota Kalsel)

Kemudian ditentukan satu model yang terbaik diantara *CEM*, *FEM*, serta *REMOmmon Effect Model*, *Fixed Effect Model*, serta *Random Effect Model* dengan membandingkannya menggunakan *Uji Chow* dan *Uji Hausman*.

#### ***Uji F***

Untuk menjawab perumusan permasalahan pertama adalah menunjukkan apa terdapat hubungan pengaruh simultan diantara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam pengolahan dipakai statistik F pada taraf keputusan 5%, jika nilai probabilitas F lebih kecil daripada 0,05 maka  $H_0$  ditolak, sedangkan jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.

#### ***Uji T***

Untuk menjawab perumusan masalah yang kedua digunakan uji T dalam menentukan variabel bebas manakah yang paling dominan atau secara parsial dalam mempengaruhi variabel

terikat. Keputusan diambil T hitung dan T tabel pada 5%. Apabila T hitung < T tabel = H0 diterima H1 ditolak, begitu pula sebaliknya jika T hitung > T tabel = H0 ditolak H1 diterima.

#### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Untuk memperlihatkan persentase variabel bebas mempengaruhi kepada variabel terikat (Sugiyono, 2012). Rumusnya :

$$Kd = R^2 + 100\%$$

Ket :

Kd = Koefisien Determinasi

R<sup>2</sup> = Koefisien Korelasi

#### **Koefisien Korelasi (R)**

Dilakukan demi menjelaskan kekuatan serta keterkaitan variabel bebas pada variabel terikat (Sugiyono, 2012).

Apabila hasil (R) dekat angka 1, artinya pengaruh diantara variabel bebas dan variabel terikat sangat kuat juga sebaliknya jika hasil (R) mendekati angka 0, artinya pengaruh diantara variabel bebas dan variabel terikat menjadi sangat lemah. Dihitung dengan melakukan pengakaran dari nilai *R-Square* ( $R^2$ )  $\sqrt{R^2}$ .

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Deskripsi Statistik Variabel Penelitian**

#### **Penyerapan Tenaga Kerja**

**Tabel 2**  
**Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2015 – 2019 (Jiwa)**

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tanah Laut	150.510	156.346	154.233	156.792	165.710
2	Kotabaru	137.684	151.548	150.600	155.508	153.439
3	Banjarnegara	270.992	288.215	287.442	292.073	300.296
4	Barito Kuala	156.172	169.049	162.497	171.958	165.277
5	Tapin	89.760	91.262	93.726	92.805	94.390
6	Hulu Sungai Selatan	111.218	118.024	118.455	120.936	121.705
7	Hulu Sungai Tengah	135.082	139.796	138.463	141.520	136.185
8	Hulu Sungai Utara	109.574	113.332	113.133	113.484	113.205
9	Tabalong	122.418	129.576	126.767	132.157	125.637
10	Tanah Bumbu	139.195	149.339	151.301	154.275	160.265
11	Balangan	62.192	67.753	69.496	68.719	65.072
12	Kota Banjarmasin	300.667	303.122	304.650	309.008	319.572
13	Kota Banjarbaru	104.038	108.616	104.398	112.431	115.983
	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>1.889.502</b>	<b>1.986.445</b>	<b>1.975.161</b>	<b>2.021.666</b>	<b>2.036.736</b>

Sumber : BPS Provinsi Kalsel

Pada Tabel 2 terlihat dari tahun 2015 – 2016 jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan, mengalami penurunan pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 – 2019 kembali naik. Sedangkan pada masing-masing Kabupaten/Kota jumlah tenaga kerja mempunyai jumlah yang bervariasi setiap tahunnya.

#### **Produk Domestik Regional Bruto**

Dari data BPS jumlah PDRB Kabupaten atau Kota di Kalimantan Selatan dalam 2015 sampai dengan 2019 cenderung naik setiap tahun. Dimana persentase pertumbuhan tertinggi tahun 2017 yaitu 5,25% dan persentase terendah pada tahun 2015 sebesar 3,82%.

### **Penanaman Modal Asing**

Menurut Dinas PMPTSP tren realisasi investasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2019 terlihat target realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan realisasi mengalami naik turun. Meskipun berfluktuasi namun realisasi masih diatas target, kecuali pada tahun 2017 target investasi sebesar 8,1% sedangkan realisasi nya hanya sebesar 6,25%.

Menurut data Dinas PMPTSP, penanaman modal asing Kabupaten/Kota mengalami jumlah yang naik dan turun 5 tahun terkahir yaitu 2015 – 2019. Dengan jumlah PMA terendah pada tahun 2016 yaitu Rp. 375.915.203 juta rupiah, tertinggi tahun 2019 yaitu Rp. 1.821.711.705 milyar rupiah.

### **Penanaman Modal Dalam Negeri**

Berdasarkan data dari Dinas PMPTSP realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan selama 2015 – 2019 mengalami pergerakan naik turun yang bervariasi. Total PMDN terendah pada tahun 2019 yaitu Rp. 510.627.226 juta rupiah, dan tertinggi tahun 2017 yaitu Rp. 578.349.679 juta rupiah.

Menurut Perda Nomor 2 2016 mengenai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016 – 2019, target penanaman modal adalah untuk meningkatkan investasi. Pada 2019 PMA serta PMDN ditargetkan sebanyak Rp. 10,5 triliun rupiah.

### **Belanja Modal**

Data dari Badan Keuangan Provinsi Kalsel Kabupaten/Kota selama tahun 2015 – 2019 berfluktuasi setiap tahunnya. Hingga tahun 2019 mencapai Rp. 456.274.382 juta rupiah.

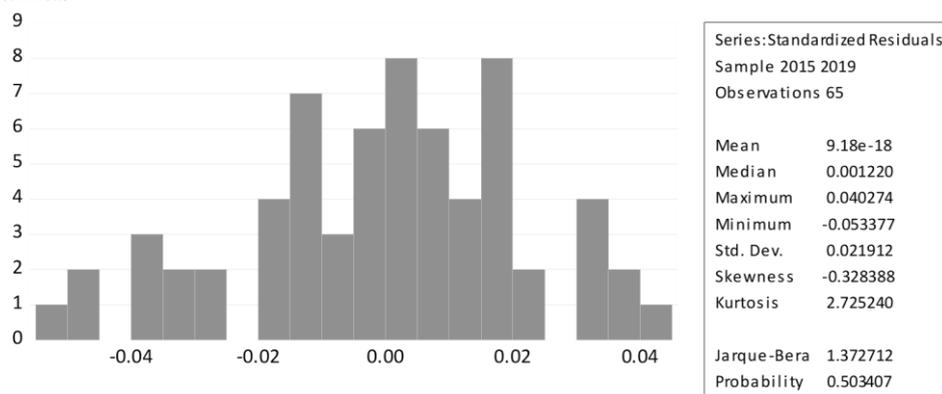
### **Upah Minimum**

Menurut data Disnakertrans Kalimantan Selatan mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diterapkan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2015 sampai 2019. Namun pada Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu yang menggunakan UMK jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini dikarenakan UMP adalah batasan standar menetapkan UMK, dimana harus lebih besar atau sama UMP.

## **Analisis Data**

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber : Olah Data Eviews 11

Dari Gambar 1 diperoleh nilai probabilitas yaitu  $0,503407 > \alpha = 0,05$ , artinya bahwa asumsi uji normalitas terpenuhi dan data normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	X1	X2	X3	X4	X5	VIF
Produk Domestik Regional Bruto (X1)	1.000000	0.094218	0.022613	0.062225	0.118718	1.002832
Penanaman Modal Asing (X2)	0.094218	1.000000	0.171782	-0.012487	0.057461	1.029255
Penanaman Modal Dalam Negeri (X3)	0.022613	0.171782	1.000000	-0.205021	-0.018513	1.054044
Belanja Modal (X4)	0.062225	-0.012487	-0.205021	1.000000	0.029049	1.070739
Upah Minimum (X5)	0.118718	0.057461	-0.018513	0.029049	1.000000	1.145840

Sumber : Olah Data Eviews 11

Pada Tabel 3 terlihat nilai *Correlations* atau  $r < 0,8$  dan pada hasil *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10,00. Dimana bisa disebutkan tidak terjadinya multikolinieritas diantara masing-masing variabel penelitian.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	-1.959363	4.319219	-0.453638	0.6518
Produk Domestik Regional Bruto (X1)	0.075072	0.053204	1.411015	0.1635
Penanaman Modal Asing (X2)	0.100915	0.055133	1.830381	0.0722
Penanaman Modal Dalam Negeri (X3)	0.022334	0.055326	0.403683	0.6879
Belanja Modal (X4)	0.003488	0.086327	0.040403	0.9679
Upah Minimum (X5)	-0.076311	0.265840	-0.287055	0.7751

Sumber : Olah Data Eviews 11

Berdasarkan hasil pada Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas setiap variabel , yaitu PDRB 0,1635, PMA 0,0722, PMDN 0,6879, belanja modal 0,9679, dan upah minimum 0,7751. Artinya nilai variabel-variabel  $> 0,05$ , sehingga dapat dikatakan penelitian terbebas dari heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Data Panel**

**Tabel 5**  
**Hasil Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)**

Variabel	Coefficient	Standard Error	t-Statistic	Probabilitas
Constanta	9.275998	0.458977	20.21017	0.0000
Produk Domestik Regional Bruto (X1)	0.007352	0.010440	0.704163	0.4848
Penanaman Modal Asing (X2)	-0.003662	0.005775	-0.634175	0.5290
Penanaman Modal Dalam Negeri (X3)	-0.005741	0.006412	-0.895419	0.3751
Belanja Modal (X4)	-0.007351	0.010306	-0.713306	0.4792
Upah Minimum (X5)	0.187705	0.025714	7.299689	0.0000
R.Square (R <sup>2</sup> )			0.997036	
F-Statistik (F hitung)			929.8998	
Probabilitas F-Statistik			0.000000	

Sumber : Olah Data Eviews 11

Dapat terlihat bahwa nilai koefisien setiap variabel dapat dirumuskan model estimasinya berikut :

$$\hat{Y}_{it} = 9.275998 + 0.007352 X_{1it} - 0.003662 X_{2it} - 0.005741 X_{3it} - 0.007351 X_{4it} + 0.187705 X_{5it}$$

### **Uji F**

Berdasarkan hasil dari *Fixed Effect Model* probabilitas F statistik  $.0000 < 0,05$  (alpha 5%), maka PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum dengan signifikan bersamaan mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja.

### **Uji T**

Dari uji *Fixed Effect Model*, PDRB mempunyai nilai probabilitas t statistik 0,4848, PMA 0,5290, PMDN 0,3751, belanja modal 0,4792, dan upah minimum Kabupaten/Kota 0,0000. Sehingga disimpulkan bahwa variabel upah minimum Kabupaten/Kota ( $X_5$ ) mempunyai nilai probabilitas yang paling mendekati 0 yang mana dapat dikatakan mendominasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Setelah dilakukan pengujian menggunakan aplikasi statistik Eviews 11, seperti Tabel 5 nilai *R-Square* 0,997036, berarti kemampuan variabel bebas yaitu PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum Kabupaten/Kota mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 0,997036 atau 99,73% atau sangat kuat, dan 0,30% dipengaruhi variabel lain diluar model.

### **Koefisien Korelasi (R)**

Nilai koefisien korelasi dihasilkan atas pengakaran dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), selanjutnya nilai koefisien korelasi dihitung korelasi  $\sqrt{0,997036} = 0,9985169002$ . nilai sebesar 0,9985169002 yaitu pengaruh variabel bebas PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum, variabel terikat penyerapan tenaga kerja berpengaruh sangat kuat.

## **PENUTUP**

### **Implikasi Penelitian**

Menentukan seberapa besarkah pengaruh dari variabel PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum kepada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2015 – 2019. Atas hasil uji dan analisis regresi, terlihat bahwa variabel bebas dengan variabel terikat simultan mempengaruhi positif. Kemudian secara parsial upah minimum mempengaruhi positif kepada penyerapan tenaga kerja.

### **Keterbatasan Penelitian**

Variabel dipakai untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja disini hanya 5 variabel, sedangkan masih banyak variabel-variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan hanya dalam waktu 5 tahun, dikarenakan ketidakmampuan peneliti jika harus lebih dari 5 tahun dengan menggunakan metode analisis data yang telah dipilih. Serta kesulitan dalam mengolah data menggunakan aplikasi *Eviews 11* karena pertama kalinya bagi peneliti.

Keterbatasan teknis mengenai izin permohonan data-data dengan pihak terkait terutama pada instansi pemerintahan, cukup memerlukan waktu yang lama untuk setiap prosesnya dari mengirimkan surat permohonan data kemudian menunggu konfirmasi dari pihak instansi sampai dengan diberikan data yang diminta. Serta kurangnya akses pemberian data yang sudah diolah dalam bentuk *website* oleh instansi-instansi pemerintah terutama masing-masing Kabupaten/Kota apalagi jika tahun-tahun terdahulu data sulit untuk diperoleh.

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis penelitian kesimpulannya adalah (1) PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum Kabupaten/Kota dengan simultan mempengaruhi signifikan pada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019, (2) Upah minimum dengan parsial mendominasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sedangkan PDRB, PMA, PMDN, serta belanja modal tidak mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2019.

## Saran

Dari penulis (1) PDRB dapat mempengaruhi tenaga kerja, pemerintah masing-masing daerah diharapkan terus meningkatkan setiap sektor-sektor PDRB potensial untuk meningkatkan pendapatan setiap daerah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, (2) Seperti yang diketahui potensi sumber daya alam Kalimantan Selatan sangat kaya. Maka pemerintah diharapkan dapat berfokus melakukan investasi kepada sektor-sektor penting yang mampu meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi pada pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan, dan berbagai sektor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota, (3) Pemerintah dapat menggunakan anggaran dengan maksimal untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan terlebih dahulu mengutamakan tenaga kerja lokal yang berasal dari Kabupaten/Kota tersebut dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar daerah atau tenaga kerja asing, sehingga jumlah pengangguran masing-masing Kabupaten/Kota tersebut dapat berkurang, (4) Kebijakan UMK sangat mempengaruhi dalam merangsang kesempatan kerja, sehingga diharapkan pemerintah dapat memperhatikan dan dapat terus meningkatkan kebijakan upah minimum ini sesuai dengan keadaan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu dalam menentukan jumlah besaran yang akan diterapkan pemerintah dapat memperhatikan sisi pengusaha dan juga sisi pekerja agar sama-sama diuntungkan, serta pekerja yang bekerja mendapatkan gaji yang memang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

## BIBLIOGRAPHY

- Agustini, Y., Kurniasih, E.P. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis dan Kewirausahaan*. 6(2), 97-119.
- Badan Pusat Statistik (2020). Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019.
- Badan Pusat Statistik (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019*.
- Badan Keuangan Daerah (2020). *Jumlah Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019*.
- BR, Afrida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2020). *Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019*.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2020). *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019*.
- Effendi, Alamsyah. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 3(2), 500-511.
- Ghozali. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Porter. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro. (2012). *Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Munandar. (2017). Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. 8(1), 2502-2024.
- Simanjuntak. (2005). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- 
- Sugiyono. (2012). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrituah, Hesty. (2020). Peran Mutu Sumberdaya Manusia PMA dan PMDN Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 3(2), 470-484.
- Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. United Kingdom. Pearson Education Limited.
- UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003. "Kementerian Ketenagakerjaan". (1):34-35.
- Zulfaetti, Wibisono, dan Amir. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. 3(3), 200-212.